



DR. Yusuf Al Qaradhawi



TARBIYAH POLITIK HASAN AL BANNA

Referensi Gerakan Dakwah di Kancah Politik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TARBIYAH POLITIK HASAN AL BANNA

referensi gerakan dakwah di ranah politik

Bintaro: Ihsan Media, 2018, 172 hlm

ISBN : 978-602-61468-9-2

1. Referensi I. Judul

Judul Asli:

at Tarbiyah As Siyasiyah Inda Hasan Al Banna

Penulis:

DR. Yusuf Al Qaradhawi

Penerjemah:

Muhammad Lili Nur Aulia

Penyuting & Perwajahan:

Tim Ihsan Media

Penata Letak:

Abi Khalid

Cetakan I : 2018

Penerbit:

Ihsan Media

Jl. Nako C3/3, Komplek Pondok Jaya Bintaro 3A

Tangerang Selatan Telp. 0822-6162-3155

E-mail: ihsanmediapenerbit@gmail.com

web: ihsanmedia.com

ANGGOTA IKAPI

Distributor:

bukuinspirasiku.com

sms/wa/telegram: 0813-1012-1842

E-mail: bukuinspirasiku@gmail.com

Pengantar Penerbit

Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah ﷻ atas setiap nikmat Islam, Iman dan Ihsan yang diberikan-Nya kepada diri kita. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada pemimpin dan teladan utama umat Nabi Muhammad Rasulullah ﷺ.

Buku Tarbiyah Politik Hasan Al Banna hadir kembali untuk menjadi salah satu referensi bagi umat muslim dalam memahami aspek politik islam. Ada delapan pilar penting pemikiran Hasan Al Banna untuk menjelaskan pentingnya politik dalam Islam. Buku ini merupakan hasil kajian yang ditulis oleh Yusuf Al Qaradhawi dengan mengupas dimensi aspek politik lebih dalam, mengungkap orisinalitas serta uraian lebih detail tentang aspek politik dalam metode tarbiyah yang digagas oleh Hasan Al Banna.

“Kami menyeru pada prilaku salaf shalih dari generasi umat yang menjadi teladan kami. Kami menyeru kalian pada Islam dan nilai-nilai Islam serta hukum Islam. Jika ini kalian anggap sebagai politik, maka itulah politik kami.” Untaian kalimat Hasan Al Banna yang begitu jelas memaparkan apa itu hakikat gerakan politik dalam Islam.

Semoga buku ini memberikan manfaat kebaikan bagi

para pembacanya dan memberikan energi semangat untuk senantiasa berkontribusi dalam gerakan kebaikan.

Ihsan Media

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	I
Setiap Muslim Adalah Politisi	III
Muqaddimah	VII
Tarbiyah Politik Imam Hasan Al Banna.....	1
Pilar-pilar Pendidikan Politik Hasan Al Banna.....	8
1. Memadukan Antara Islam dan Politik (Agama dan Negara).....	9
2. Membangkitkan Kesadaran Wajibnya Membebaskan Tanah Air Islam	17
3. Membangun Kesadaran Wajibnya Menegakkan Pemerintahan Islami (Daulah Islamiyah)	27
4. Menegakkan (Eksistensi) Umat Islam	47
5. Membangun Kesadaran Wajib Mewujudkan Persatuan umat Islam.....	59
6. Menyambut Sistem Undang-undang dan Parlemerter	91
7. Mengkritisi Multipartai dan Kepartaian	105
8. Perlindungan bagi Kaum Minoritas dan Orang Asing	127
Penutup Kajian	140
Ringkasan	146
Catatan Kaki.....	149

Muqaddimah

Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah semata. Shalawat serta salam atas Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. *Wa ba'du.*

Markaz Al 'Ilam Al Araby li Ad Diraasaat, Lembaga Pusat Kajian Informasi Arab meminta saya untuk menggelar sebuah konferensi, memperingati seratus tahun kelahiran Imam Syahid Hasan Al Banna. Saya diminta terlibat dalam kajian tentang *At Tarbiyah As Siyasyah Inda Hasan Al Banna* (Pendidikan Politik Hasan Al Banna)

Sebelum ini, saya pernah menulis sebuah buku berjudul *At Tarbiyah Al Islamiyah Inda Madrasati Hasan Al Banna* (Pendidikan Islam dalam Madrasah Hasan Al Banna). Dahulu, saya menulis buku itu dalam rangka memperingati tiga puluh tahun peristiwa syahidnya Al Banna, atau lima puluh tahun berdirinya fondasi Jama'ah Al Ikhwan Al Muslimun. Dalam buku itu saya uraikan tonggak-tonggak pendidikan Islam Al Banna, karakteristiknya, dan berbagai sisinya, antara lain : Aspek politik.

Tulisan saya pada lembar-lembar berikut ini adalah penyempurna dari buku itu, dengan mengupas dimensi aspek politik lebih dalam, mengungkap orisinalitas serta uraian lebih detail tentang aspek politik dalam metode tarbiyah yang digagas oleh Hasan Al Banna.

Metoda penulisan dilakukan dengan sejumlah anasir:

1. Mengenal dan mengkaji perkataan Imam Hasan Al Banna melalui berbagai kumpulan risalahnya.

Alhamdulillah, ada banyak perkataan Al Banna di dalam berbagai risalahnya tentang politik. Meskipun tidak sedikit pula terdapat kekeliruan dalam penulisannya dalam pencetakan yang memang sudah lama. Tapi, berbagai risalah itu merupakan simpanan berharga yang memuat paradigma Hasan Al Banna, terbukti risalah itu beberapa kali disebarluaskan semasa beliau hidup. Beliau ingin menyampaikan dakwah melalui risalah-risalah itu, dan menyampaikan pemikirannya kepada masyarakat luas, khususnya pada para Ikhwan. Risalah-risalah itu juga tersebar di kalangan Ikhwan, hingga ada sebagian yang menghafalnya yang memberi pengaruh kuat dalam mengarahkan pemikiran dan sikap mereka. Kami juga mencari berbagai informasi melalui buku-buku yang ditulis Imam Syahid Hasan Al Banna selain risalah-risalah itu. Juga berbagai artikelnnya yang tersebar di majalah dan koran Ikhwan maupun non Ikhwan. Sebagian Ikhwan ada yang *concern* terhadap pembuatan arsip ini mengumpulkannya lalu menyebarkannya lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Ustadz Jam'ah Amin di Iskandariyah, meskipun inti pemikiran itu tetap ada pada risalah-risalah yang disebarluaskan tadi.

2. Metoda *Muqaranah* (komparasi) antara perkataan Hasan Al Banna satu sama lain yang terdapat di berbagai risalahnya. Ini penting dilakukan untuk mengetahui bila ternyata ada ungkapan yang berlawanan atau saling menegaskan dalam pandangan dan ijtihadnya. Hal ini mungkin terjadi disebabkan perubahan kondisi atau perubahan pemikiran seseorang, atau juga karena pembaruan informasi yang diperoleh, atau yang lainnya. Metode perbandingan juga dilakukan antara perkataan Al Banna dengan perkataan para tokoh pembaharu dan tokoh perubahan, jika diperlukan.

3. Metoda *An Naqd Al 'Ilmi Al Maudhu'i* (kritik ilmiah tematik) yang dilakukan dengan baik. Karena memang ada beberapa hal yang penting dikritisi dari pandangan-pandangan Ustadz Al Banna. Hal ini bukan sesuatu masalah besar dalam tradisi ilmiah. Hasan Al Banna sendiri bahkan mengajarkan dalam "*Ushul Al 'Isyriin*" (Prinsip 20): "Setiap orang bisa diambil perkataannya atau ditolak, kecuali *Al Ma'shuum* Rasulullah ﷺ." ⁽¹⁾

Betapapun kecintaan dan penghormatan saya yang begitu tinggi kepada Ustadz, namun saya kira bukanlah cacat bila pemikirannya dikritisi. Bagaimanapun dia adalah anak zamannya dan lingkungannya yang pasti memberi efek pengaruh kepadanya. Cukuplah ia telah berusaha dan berijtihad. Bila benar maka ia memperoleh dua pahala. Dan bila keliru ia memperoleh satu pahala. "*Amal itu ditimbang dari niatnya. Dan setiap orang mendapat ganjaran pahala sesuai yang ia niatkan.*" ⁽²⁾

Saya harap, pembaca mulia mendapatkan sesuatu yang mencerahkan dari buku ini. Sesuatu yang bisa menyinari hatinya dengan keimanan. Sesuatu yang bisa menjelaskan pemahaman yang bias yang tersebar di khalayak ramai. Dan sesuatu yang bisa lebih memperkuat tekad untuk menambah amal shalih dan pemberian yang membangun, untuk kebaikan pribadi, masyarakat, dan seluruh umat Islam.

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

Dhoha, Rabi'ul Akhir 1427/Mei 2007

Yang faqir akan ampunan Rabbnya

Yusuf Al Qaradhawi



Tarbiyah Politik

Imam Hasan Al Banna

Hasan Al Banna -semoga rahmat Allah atasnya- merupakan sosok multi potensi dan kemampuan. Ia bukan saja seorang ulama dan *da'i*, tapi juga seorang *reformis*, pembaharu, pemimpin, sekaligus *murabbi* atau pendidik. Ia seorang *murabbi* dalam hal potensi diri, secara teori maupun praktik. Ia mempunyai berbagai sarana yang sangat dibutuhkan oleh seorang *murabbi* yang sukses. Kejelian dan kejelasan pandangan, hati yang lapang, pikiran yang terbuka, lisan yang fasih, wajah yang bercahaya, firasat yang tajam dan unik, di samping tentu saja ilmu yang luas dan keahlian teknis dan kemasyarakatan.

Tidak heran bila kita dapati setiap orang yang dekat dan hidup bersamanya, akan segera mendapat pengaruh. Bahkan, setiap orang yang bertemu dengannya sekilas saja. Pertemuan singkat itu akan berbekas dalam ingatannya sehingga ia tidak melupakan perkataannya yang penuh *ibrah*, atau prilakunya yang menyentuh, atau cerita-cerita yang memiliki nilai pelajaran, dan sebagainya. Itulah yang dirasakan oleh banyak orang yang mengenalnya.

Benarlah perkataan *Syaikh* Al Banna ﷺ.

علامة الرجل الصالح أن يترك في كل مكان يحل فيه أثرا صالحا

“Ciri-ciri seorang *shalih* adalah meninggalkan kesan baik di setiap tempat yang ia datangi.”

Seperti itulah Hasan Al Banna.

Tarbiyah dalam pandangan Imam Al Banna, memiliki dua karakter khusus:

Pertama : التكامـل (Saling Menyempurnakan)

Kedua : التوازن (Keseimbangan)

Arti *At Takaamul* adalah, tarbiyah yang dilakukan haruslah *komprehensif*, menyeluruh, tanpa menganulir satu bagian dengan bagian yang lain. Tarbiyah harus dilakukan dengan memperhatikan aspek ruhani dan jasad, akal dan perasaan, jiwa dan hati, seluruhnya bekerja dalam membentuk kepribadian Islam secara sempurna. Ruhani dilatih dengan *ubudiyah*, tubuh dibina melalui olah raga, akal diasah dengan wawasan ilmu, akhlak dihiasi dengan keutamaan, ruang sosial diisi dengan keterlibatan dalam berkhidmah pada masyarakat, aspek politik ditunaikan dengan memberi kesadaran terhadap ragam permasalahan negara dan umat Islam. Demikianlah, tarbiyah tidak boleh mengabaikan salah satu aspek nilai Islam.

Sedangkan makna *At Tawaazun* adalah, tarbiyah memberikan semua sisi ajaran Islam haknya, tanpa ada yang dikurangi. Tidak ada satu sisi yang mengalahkan sisi yang lain. Tidak boleh tumpang tindih sehingga ada hak yang tidak terpenuhi. Bahkan dikatakan kepada orang yang telah melewati batas: “*Berhentilah kamu pada batas itu. Komitmenlah jalanmu yang lurus.*”⁽¹⁾

Bukan hal asing bila yang paling penting dari ragam bentuk tarbiyah yang ditekankan Ustadz Al Banna adalah: *Tarbiyah Siyasyiah* atau Pendidikan Politik. Aspek yang banyak terabaikan oleh kalangan agamawan dan organisasi keagamaan Mesir pada saat Al Banna hidup.

Aspek Politik

Benar, salah satu aspek penting yang diperhatikan Imam Syahid Hasan Al Banna adalah aspek politik. Yang dimaksud dengan aspek ini adalah sesuatu yang terkait dengan urusan pemerintahan, sistem negara, hubungan antara pemerintah dan rakyat, hubungan antar negara Islam dan non Islam, penyikapan terhadap penjajah yang merampok tanah air, sikap terhadap partai-partai politik, pandangan terhadap hukum dan undang-undang, *syuro* dan demokrasi, dan berbagai masalah lainnya.

Aspek ini sebelum munculnya dakwah Hasan Al Banna dan berdirinya madrasah Al Ikhwan di Mesir, merupakan masalah yang tidak dipikirkan oleh organisasi-organisasi Islam. di Mesir ketika itu. Aktifitas dan pemikiran ormas agama saat itu berada di luar lingkup politik. Pemahaman politik menjadi berbenturan dengan pemahaman agama, sebagaimana benturan antara hitam dan putih sehingga tidak mungkin dua aspek itu pada satu sosok ataupun pada satu organisasi. Manusia ketika itu terpilah menjadi dua, manusia agama dan manusia politik. Organisasi juga terbagi menjadi dua, organisasi keagamaan dan organisasi politik. Tidak boleh seorang agamawan sibuk di lapangan politik. Sama tidak bolehnya seorang politisi sibuk di wilayah keagamaan. Sebagaimana tidak bolehnya keterlibatan organisasi keagamaan di lapangan politik, dan sebaliknya organisasi politik di wilayah agama. Meskipun ternyata, masyarakat ketika itu masih bisa mentolerir dan memaklumi bila ada tokoh politik masuk ke wilayah agama. Tapi tidak sebaliknya, tokoh agama atau organisasi agama seperti melakukan dosa besar yang tak mungkin terampuni bila terlibat dalam wilayah dan urusan-urusan politik.

Dalam situasi seperti inilah, Mesir dan juga sebagian negara, berdiri berbagai organisasi keagamaan *an sich*. Seperti kelompok

tarekat sufi dan berbagai organisasi agama lain yang meletakkan prinsip dasar organisasinya pada statemen “*tidak ada hubungan dengan masalah politik*”. Di sisi lain, berbagai organisasi lain juga bermunculan, yang tak berkaitan dengan agama. Organisasi itulah yang bernama partai politik, seperti Partai Al Wathan, Partai Al Ummah, Partai Al Wafd, dan berbagai derifatnya, Partai Ad Dustour, dan lainnya. Partai-partai ini berkarakter sipil ataupun sekuler. Pandangan dan prilakunya berdiri atas prinsip “*memisahkan agama dari negara*” dan “*memisahkan negara dari agama*”. Meskipun ada pula partai politik yang agak seimbang dalam hal agama dan politik, berdasarkan penuturan para tokohnya. Partai Al Wathani misalnya, mempunyai sisi keIslaman yang tercermin pada Yayasan Musthafa Kamal dan para pengikutnya.

Partai-partai itu seluruhnya juga meyakini nasionalisme yang sempit sehingga sebagiannya banyak yang terlibat merayakan tradisi *jahiliyah* yang lampau, seperti *Fir'aunisme* di Mesir, *Finkisme* di Suriah, *Ashuriyah* di Irak dan lain sebagainya. Jika ada di antara mereka yang tidak mempercayai *tur'ah* nasionalisme, mereka mempercayai *rasisme*, seperti *Thuraiya* di Turki, ras Arab di negara Arab, ras suriah di Suriah besar dan lainnya.

Hasan Al Banna masuk dalam peperangan keras untuk menolak berbagai paham yang keliru tentang hubungan antara agama dan politik. Pemahaman itu telah tertanam akibat kebodohan dan kecenderungan hawa nafsu, diperkuat oleh penjajahan secara pengetahuan yang terus dipelihara, sehingga akarnya semakin kuat tertanam dan batangnya menjulang kokoh ke atas.

Sementara, mau tidak mau, harus ada perang terhadap pemikiran yang keliru lalu menggantinya dengan pemikiran yang

benar yakni pemahaman Islam yang menyeluruh dan terintegrasi mencakup seluruh aspek hidup. Termasuk, politik. Seperti dipaparkan dalam Al Quran dan hadits, petunjuk Rasulullah ﷺ, sirah para sahabat, dan perjalanan umat Islam selama 13 abad atau lebih. Cukuplah Al Quran mengingatkan kita untuk tidak meremehkan salah satu dari apa yang diturunkan Allah ﷻ.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴿٤٩﴾

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS. Al-Maidah: 49)

Al Quran pun menegur Bani Israil karena mereka memilah-milah kitab suci mereka, mengambil sebagian dan menolak sebagian.

أَفْتُومُنُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴿٨٥﴾

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. (QS. Al-Baqarah: 85)

Imam Syahid Hasan Al Banna mempunyai beberapa statemen dalam hal ini, yang masih terpelihara oleh para Ikhwan. Antara lain perkataannya yang termaktub pada salah satu risalahnya: “Jika kalian ditanya, ke mana kalian menyeru? Katakanlah: Kami menyeru kepada Islam yang didatangkan oleh Rasulullah Muhammad ﷺ. Dan pemerintahan adalah bagian darinya. Serta kebebasan adalah di antara kewajibannya.” Jika dikatakan kepada kalian: “Ini adalah politik.” Katakanlah : “Ini adalah Islam. Kami tak mengenal pembagian seperti itu.”⁽²⁾

Hasan Al Banna ﷺ menjawab kepada orang yang mengatakan, “Sesungguhnya Al Ikhwan Al Muslimun adalah organisas politik dan seruan yang mereka kumandangkan adalah kampanye politik..” Al Banna mengatakan, “Wahai kaum kami, sesungguhnya kami menyeru kalian kepada Al Quran yang ada di tangan kanan kita dan sunnah di tangan kiri kita. Kami menyeru pada prilaku salaf shalih dari generasi umat yang menjadi teladan kami. Kami menyeru kalian pada Islam dan nilai-nilai Islam serta hukum Islam. Jika ini kalian anggap sebagai politik, maka itulah politik kami. Jika yang diserukan untuk kalian adalah kepada prinsip itu disebut politik, maka kamilah orang yang *-alhamdulillah-* paling politik. Jika kalian namakan itu adalah politik, maka katakanlah apa yang kalian kehendaki. Label dan sebutan itu takkan membahayakan kami, jika label itu sudah terlihat jelas dan terungkap tujuannya.”⁽³⁾

Pilar-pilar Pendidikan Politik Hasan Al Banna:

1. Memadukan antara Islam dan politik
2. Membangkitkan kesadaran akan kewajiban membebaskan tanah air Islam
3. Membangkitkan kesadaran akan kewajiban mendirikan pemerintahan Islami
4. Membangun eksistensi umat Islam

5. Menyadarkan kewajiban persatuan Islam
6. Menyambut sistem perundang-undangan
7. Mengkritisi partai-partai
8. Melindungi kelompok minoritas dan unsur asing

Penutup Kajian

Inilah rambu-rambu pendidikan politik Hasan Al Banna. Ia merupakan pendidikan baru yang lain dengan pendidikan yang dijalani oleh partai-partai dan organisasi-organisasi politik jika benar mereka memiliki sebuah pendidikan politik tertentu. Sebagaimana tidak sama dengan pendidikan yang dulu menguasai kelompok-kelompok agama dan aliran-aliran sufi pada waktu itu, dimana arah pendidikan mereka adalah penghormatan berpolitik.

Pendidikan Hasan Al Banna terhadap Al Ikhwan Al Muslimun adalah pendidikan Islam yang murni, karena ia mengambil elemen-elemen utama dan konsepnya dari Islam saja. Arti keIslamian pendidikan menurut Hasan Albanna adalah keIslamian sumber *إسلامية المصدر* dan keIslamian orientasi *إسلامية الغاية*. Tidak ada yang diperselisihkan dalam hal ini. Meskipun terkadang kita menyelisih Al Banna pada beberapa rincian pendapatnya, seperti dalam masalah partai dan pandangan Al Banna mengenainya, juga masalah kewarganegaraan non Islam dan kerasnya pendapat Al Banna dalam mengharamkannya.

Agar Kita Termasuk Orang yang Jujur Menilai

Kita harus menilai pendapat-pendapat Imam Hasan Al Banna dengan penilaian yang adil. Kita seharusnya meletakkannya dalam bingkai dan konteks masa, lingkungan, dan kondisinya. Terkadang ia memang bersikap keras pada beberapa hal yang saat ini kita bersikap longgar dalam hal tersebut, tergantung dengan perubahan dunia, interaksi manusia, kebutuhan dunia, dan berubahnya sebagian negara penjajah menjadi negara sekutu dan partner bagi Negara Islam. Sebagaimana dalam beberapa tulisannya, ketika itu ia sedang berada pada gejolak jiwa muda

yang sangat semangat membela kebenaran, menentang kebatilan, dan mudah terbakar dalam konfrontasi.

Di antara contohnya adalah, pendapat Al Banna perihal menjadi warganegara asing. Ustadz Al Banna melihat hal itu sebuah keharaman yang pasti. Bahkan sebuah dosa besar, dan bahkan bisa menjadikan pelakunya kafir dan murtad.

Begitulah jawaban Al Banna ketika ditanya tentang rencana Inggris mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan bagi sebagian orang asing yang tinggal di negaranya. Tentunya siapa saja yang menyandang kewarganegaraan tertentu, ia harus loyal pada negara tersebut, menghormati peraturannya, taat pada pemerintahnya, dan turut serta dalam memerangi orang yang menyerang negara tersebut atau ketika negara tersebut menyerang yang lain.

Ketika menjawab pertanyaan tersebut, al-ustadz Hasan Al Banna berkata:

“Seorang Muslim yang menggunakan kewarganegaraan negara non muslim, itu merupakan salah satu dosa besar yang menyebabkan murka Allah dan hukuman yang berat.” Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Anas, Rasulullah ﷺ bersabda:

من ادعى لغير أبيه أو انتمى لغير موالیه؛ فعليه لعنة الله المتتابعة
إلى يوم القيامة

“Barangsiapa mengaku anak orang lain selain bapaknya atau menisbatkan diri pada selain tuannya, maka ia berhak mendapat laknat Allah hingga hari kiamat.”⁽¹⁾

Ayat yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah ﷻ,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman.” (QS. Ali Imran: 28)

Bagaimana seandainya setelah itu ia dikenai kewajiban dan hak yang membatalkan loyalitasnya (wala') kepada sesama Muslim dan memutuskan ikatan mereka? Sehingga menjadikan seorang Muslim berada dalam barisan orang kafir melawan saudaranya yang Muslim. Yang terbaik bagi seorang Muslim adalah meninggalkan Negara-negara kafir tersebut. Apabila ia tidak bisa tinggal di sana kecuali dengan merubah kewarganegaraannya, maka sesungguhnya bumi Allah masih luas. *“Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rizki) yang banyak.”* (QS. An-Nisâ':100) *Allahu a'lam.* ⁽²⁾

Tiga tahun setelah itu, Ustadz Hasan Al Banna menulis semisal fatwa tadi, tapi dengan konteks yang lain. Yaitu ketika Italia yang menduduki wilayah Tripoli, dan wilayah yang dikenal dengan nama Libya, berkeinginan merubah kewarganegaraan penduduk Tripoli dan sekitarnya menjadi kewarganegaraan Italia meskipun mereka keberatan. Italia hendak menghilangkan kewarganegaraan asli mereka dan menggantinya dengan kewarganegaraan negara penjajah yang lalim.

Tentunya sudah jelas bahwa pertanyaan pada kesempatan kali ini tidak sama dengan pertanyaan yang dulu, tapi Ustadz Hasan Al Banna menjawab dengan jawaban umum, yaitu keharaman menggunakan kewarganegaraan asing. Ia mengatakan,

“Yang kami ketahui dari agama Allah, bahwa menggunakan kewarganegaraan negara non muslim tidak boleh. Rasulullah saw bersabda, ‘Barangsiapa mengaku anak orang lain selain bapaknya atau menisbatkan diri pada selain tuannya, maka ia mendapat laknat Allah, Allah tidak menerima ganti ataupun tebusan darinya.’⁽³⁾ Menggunakan kewarganegaraan non Islam tertera dalam separuh kedua dari hadits tadi. Apabila ia rela masuk ke dalam kumpulan warganegara kafir dan mengira itu lebih baik daripada nasionalisme Islam, maka ia jelas-jelas kafir dan keluar dari agama. Namun jika ia tidak rela tapi mau menerima – padahal ia bisa keluar darinya, maka itu termasuk dosa besar yang mengerikan. ⁽⁴⁾

Fatwa Ustadz Hasan Al Banna tentang keharaman menjadi warganegara dari negara non muslim yang masih dipertanyakan ini sah-sah saja. Tapi apabila pengharaman itu digeneralisir, kami tidak setuju..

Pengharaman itu dibangun di atas landasan yang kadang tidak bisa kita terima. Yaitu penakwilan hadits “...*atau menisbatkan diri pada selain tuannya.*” Menjadi warganegara non Islam di sini disamakan dengan penisbatan diri kepada selain tuannya. Padahal yang dimaksud dalam hadits adalah penisbatan budak kepada selain orang yang memerdekakannya. Karena ini menyebabkan adanya hak waris dan sebagainya.

Ustadz Jam’ah Amin perangkum “*Serial Peninggalan Hasan Al Banna*” mengomentari hal ini dalam catatan kaki “*fatwa menjadi warganegara Inggris*”. Di sana ia menuliskan, “Para pembaca harus menghadirkan kondisi historis dan politik yang ada ketika fatwa ini dikeluarkan. Sebab, fatwa itu berubah sejalan perubahan zaman, tempat, individu, dan keadaan sebagaimana dikatakan oleh para peneliti dari kalangan ulama. Dan pada saat

pengeluaran fatwa itu, Inggris dan beberapa negara asing telah menguasai sebagian besar dunia Islam. Ketika itu setiap orang yang merubah kewarganegaraannya menjadi warganegara Inggris dijadikan tentara, lalu memanfaatkan mereka untuk menguatkan cengkeramannya atas Negara-negara Islam dan memerangi kaum Muslimin serta memaksa mereka tunduk pada kepemimpinannya.
(5)

Di akhir fatwanya tentang warga Tripoli, Ustadz Hasan Al Banna berkata:

“Telah dihadapkan pada kami pertanyaan seperti ini ketika sebagian warga Tunisia merubah kewarganegaraannya menjadi Prancis, maka kami jawab seperti fatwa ini. Para ulama Islam telah berfatwa dengan semisal fatwa ini juga. Dan semua kekafiran itu satu agama. Semoga Allah menganugerahi kemerdekaan dan mempercepat hari keselamatan.”

Sang perangkum tadi mengomentari serial ini dengan mengatakan:

“Syaikh Qaradhawi menjelaskan sesuatu yang masih samar dalam fatwa ini. Qaradhawi berkata, ‘mengambil kewarganegaraan dari suatu negara non muslim, dalam kondisi tertentu bisa dianggap sebagai pengkhianatan kepada Allah, Rasul, dan umat Islam. Seperti ketika kondisi peperangan antara umat Islam dan musuh yang menyerang Islam. Karena itulah, ketika pendudukan Prancis, para ulama Tunisia memfatwakan bahwa memilih kewarganegaraan Prancis dianggap keluar dan murtad dari Islam. Karena itu merupakan salah satu cara perlawanan, penjajahan dan senjata peperangan. Akan tetapi pada saat-saat biasa, seorang Muslim yang ingin pergi ke negara non muslim maka surat kewarganegaraan akan memberinya kekuatan dan perlindungan.

Sehingga pemerintah tidak berhak mengusirnya. Ia juga berhak mengikuti pemilu, dimana hal itu bisa menguatkan posisi umat Islam di negara tersebut, karena para kandidat akan merayu simpati mereka. Maka, memilih kewarganegaraan itu sendiri tidak dihukumi baik atau buruk. Tapi hukumnya tergantung dampak yang terjadi setelah itu, apakah bermanfaat bagi kaum Muslimin ataukah berbahaya. Seperti orang-orang Palestina khususnya yang memilih kewarganegaraan Israel. Maka ini dianggap sebagai bentuk pengakuan bagi Negara Israel secara implisit. Akan tetapi memilih kewarganegaraan di salah satu negara Barat untuk memperkuat kekuasaan kaum Muslimin di sana, maka itu sama sekali tidak haram. ⁽⁶⁾



Pondok Tahfidz Permata Qur'an

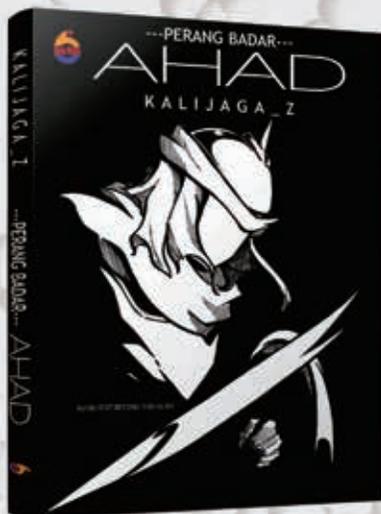
Salurkan infaq dan waqaf Anda melalui:
Rekening BSM 1200 200 205
a.n. yayasan Permata Qur'an Nusantara

Informasi Hubungi:

- Arif jiddan (0857 7975 6420)
- Kasmijan Rabbani (085 727 649 009)



New Release



ihsanmedia.com
Inspirasi Amal Kebaikan

082261623155

ihsanmedia.com

[ihsanmediapenerbit](https://www.facebook.com/ihsanmediapenerbit)

[ihsanmediapenerbit](https://www.instagram.com/ihsanmediapenerbit)



“Ciri-ciri seorang shalih adalah meninggalkan kesan baik di setiap tempat yang ia datangi. Seperti itulah Hasan Al Banna.”

